

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dalam pembangunan sektor publik di Indonesia adalah penguat persyaratan akuntabilitas lembaga publik baik di Pusat mau pun di daerah. Paradikma reformasi Indonesia di tandai dengan munculnya semangat demokratis, tanggung jawab dan ke terbukaan di segala bidang kehidupan salah satunya di bidang pendidikan. dalam pendidikan ada batasan alokasi pemerintah yang merupakan kendala penghambat peningkatan mutu pendidikan sekolah. Sekolah harus menggunakan sumber daya seefektif mungkin untuk meningkatkan penyelenggaraan mutu pendidikan di sekolah. Jika dana sekolah tidak cukup sekolah bisa coba dengan dana masyarakat. pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah harus berdasarkan akuntabilitas dan Transparansi untuk memungkinkan masyarakat agar mengetahui untuk apa dana sekolah di gunakan.

Menurut pasal 51 ayat 1 UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pada prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). hal ini mendorong manajemen pendidikan yang lebih ter arah dan ter koordinasikan dalam hal pelaksanaan, pembiayaan, pengembangan dan pemantauan sesuai peraturan, prinsip, transparansi dan tanggung jawab publik juga harus di perhatikan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Dana Bantuan operasional merupakan dana yang di gunakan untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat di gunakan untuk mendanai

beberapa kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021. Persyaratan sekolah yang menerima dana bantuan sekolah mengisi dan melakukan pemuktahiran dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah.

Penggunaan dana bantuan operasional sekolah dapat di gunakan untuk membiayai penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, penyediaan alat multimedia, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung ke lulusan dan pembayaran guru honorer. Dalam hasil penggunaan dana bantuan operasional sekolah di sampaikan oleh kepala sekolah dalam rapat dengan tim BOS selaku kuasa penggunaan anggaran dan penanggung jawab, anggota yang terdiri dari satu unsur orang tua/wali peserta didik yang di tunjukan untuk mempertimbangkan kredibilitas dan tidak mempunyai konflik keentingan tersendiri. Selain itu dana BOS yang sudah di gunakan juga harus di laporkan ke pemerintah melalui *bos.kemdikbud.go.id* apabila pihak sekolah tidak mengirimkan laporan, maka dana BOS untuk tahap selanjutnya tidak akan di salurkan. laporan yang harus di buat dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan dana BOS berdasarkan standar pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS, realisasi penggunaan dana yang di laporkan merupakan penggunaan dana BOS yang di terima sekolah pada tahun berkenaan, laporan di buat tiap tahap

dan di tanda tanganin oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS kepada pemerintahan daerah. Dengan adanya program BOS sekolah di tuntutan untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya pendidikan secara transparan kepada pemerintah dan juga masyarakat. Penggunaan dana BOS merupakan salah satu yang mempengaruhi keberhasilan program BOS, Oleh karena pengelolaan dana BOS yang baik akan membantu tercapainya tujuan program BOS secara efektif dan efisien. BOS dapat di artikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang di miliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu. Dana BOS adalah bantuan yang di program kan oleh pemerintah pusat terhadap satuan pendidikan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, maka penelitian dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Pantai Labu belum efisien
2. Penggunaan dana BOS di SMP Negeri 3 Pantai Labu belum efektif

## **1.3. Batasan Dan Rumusan Masalah**

### **1.3.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditemukan maka perlu dilakukan pembatasan masalah dala penelitian ini adalah tentang Analisis efisiensi

dan efektifitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.

### **1.3.2. Rumusan masalah**

1. Apakah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pantai Labu sudah efisien?
2. Apakah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Pantai Labu sudah efektif?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Pantai Labu.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 3 Pantai Labu.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) khususnya tingkat SMP

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi pemerintah**

Hasil Penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola pembagian Dana BOS lebih adil dan bijaksana. Karena hal demikian dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

b. Bagi Sekolah

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan peneliti tentang kegunaan dana bantuan operasional sekolah

c. Bagi siswa

Jika pemerintahan melaksanakan penggunaan dana BOS dengan baik maka dengan Dana BOS kepada setiap sekolah diharapkan siswa dapat memanfaatkan pelayanan pendidikan seperti sarana dan prasarana maksimal sehingga dapat memberikan motivasi yang tinggi

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Bantuan operasional sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program belajar 9 tahun. Jika dapat dikatakan bahwa dana BOS adalah program pemerintah yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar untuk meringankan biaya dan meringankan siswa lainnya dan sebagai pelaksana program wajib belajar serta perluasan akses untuk meningkatkan mutu pendidikan karena hampir seluruh biaya kegiatan siswa dapat memanfaatkan dana BOS tersebut dengan program BOS SD dan SMP yang terkait pendidikan dasar setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. bos harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu
- b. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin untuk satuan pendidikan karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli seragam atau alat tulis satuan pendidikan dan biaya lainnya.
- c. BOS harus menjamin kepastian lulus tingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP

- d. Kepala satuan pendidikan SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB
- e. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah dilingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah
- f. Kepala sekolah harus mengelolah dana BOS secara transparan dan akuntabel
- g. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan. sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberi sumbangan

### **2.1.2 Tujuan Bantuan operasional sekolah SMP**

- A. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun serta berperan dalam mempercepat pencapaian standar layanan minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM dan mencapai standar nasional pendidikan (SNP) pada sekolah – sekolah yang sudah memenuhi SPM
- B. Secara Khusus program BOS SD dan SMP yang bertujuan untuk:
  - 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD - SMP satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik dari satuan pendidikan Negeri maupun Swasta
3. Meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan bagi peserta didik disatuan pendidikan swasta

### **2.1.3 Sasaran Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Sasaran program BOS adalah semua satuan pendidikan SD/SDLB Swasta diseluruh profinsi diindonesia yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar menengah (Dapodik Dasmen) khusus bagi satuan pendidikan swasta juga harus memiliki izin operasional. Besar dana BOS yang diterima dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan satuan biayaa sebagai berikut:

- a. SD/SDLB : 800.000/peserta didik/tahun
- b. SMP/SMPLB : 1.000.000/peserta didik/tahun

### **2.1.4 Satuan Pendidikan Penerima BOS**

- a. Semua satuan pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB/SATAP dan SLB Negeri yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIK DASMEN) wajib menerima dana BOS
- b. Semua satuan pendidikan Swasta yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIK Dasmen) yang sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS satuan pendidikan swasta berhak menolak dana BOS diman penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui

komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan peserta didik miskin disatuan pendidikan tersebut

- c. Semua satuan didik SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua atau wali peserta didik

### **2.1.5 Pengambilan Dana BOS**

- a. Dana BOS harus diterima secara utuh oleh satuan pendidikan dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biayaa apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak mana pun.
- b. Pengambilan dana bos dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan kepala sekolah dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan menyisakan saldo minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan suatu pendidikan sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS)

### **2.1.6 Penggunaan Dana BOS**

Dana BOS digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasi sekolah non operasional non operasional sesuai dengan prioritas utama kebutuhan sekolah meliputi :

**Tabel 2.1.6 Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

No	Komponen Pembiayaan	Penjelasan
	Pengembangan	Membeli buku tekspelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang

1	Perpustakaan	digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran, mengganti buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran
2	Kegiatan dalam penerimaan peserta didik baru	a. Sejenis pengeluaran dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk) pendaftaran ulang untuk peserta didik baru b. Semua jenis pengeluaran dalam rangka dapodik dasmen yaitu pendanaan formulir, biaya masukan, validasi, update, dan pengiriman Data Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
3	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	Pembiayaan kontesktual membeli/menganti alat peraga Ipa pengembangan pendidikan karakter pembelajaran remedial dan pembelajaran, penetaan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan plang merah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), Pembiayaan Lomba - lomba yang tidak dibiayai dari dana pemerintah
4	Kegiatan ulangan ujian	Kegiatan yang dapat dibiayai adalah ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah
5	Pembelian bahan - bahan Habis pakai	Pembelian spidol, buku tulis, pensil, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku investaris, pembelian alat tulis kantor ( termasuk tinta printer, CD, dan flasdisk) pembelian minum dan makan ringan untuk kebutuhan sehari hari disatuan pendidikan, pembelian suku cabang alat kantor, pembelian alat kebersihan dan listrik.
6	Langganan daya dan jasa	Listrik, air, dan internet baik dengan acar berlangganan atau prabayar biaya penggunaan internet termasuk pemasangan baru, pembelian genset atau jenis lain misalnya panel surya jika sekolah tidak ada jaringan listrik
7	Perawatan sekolah/ rehab ringan dan sanitas sekolah	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitas sekolah (kamar mandi atau WC) dan saluran air hujan perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8	Pembayaran honorium bulanan guru	Guru honorer atau tenaga administrasi (tenaga kerja yang melakukan bagian administrasi sekolah termasuk melakukan tugas operator dapodiksmentermasuk

	dan tenaga pendidik honorer	bagian adminstrasi BOS pegawai perpustakaan, penjagan sekolah,petugas keamanan dan petugas kebersihan
9	Pengembangan potensi guru	MGMP, KKKS/MKKS menghadiri seminar yang terkait langsung dengan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidik apabila ditugaskan oleh satan pendidik, mengadakan workshop lokakarya untk meningkatkan mutu dalam rangka penerapan rencana pelaksanaan (RPP) pengembangan dan penerapan program penilaian kepada peserta didik dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sana yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda
10	Membantu peserta didik miskin	Dana BOS hanya boleh digunakan untuk membantu peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya program indonesia pintar.
11	Pembiayaan pengelolaan sekolah	Pengadaan laporan surat menyurat inisiatif bagi tim penyusun laporan BOS, biaya tranformasi dalam rangka mengambil Dana BOS di Bank/Kantor POS

*Sumber* : Pemerintahan Pusat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

### 2.1.7 Efisiensi

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga atau waktu. Melihat hal ini berarti semakin sedikit sumber daya atau dana yang digunakan dalam suatu usaha atau proses maka akan di katakan efisien. Jika mencari arti kata efisien dapat diartikan sebagai ketetapan dalam melaksanakan sesuatu dengan tidak membuang tenaga , waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan, ketepatangunaan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. Beberapa ahli juga ada yang mengartikan kata efisiensi yang dikutip dari penjelasan H. Emerson, mengartikan efisiensi sebagai

sebuah perbandingan antara masukan atau input dan hasil yang muncul antara keuntungan dengan sumber - sumber yang digunakan atau *output* . seperti halnya juga dihasilkan dengan mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dengan kata lain. Efisiensi merupakan hubungan antara apa yang telah dikerjakan.

Mahmudi (2010) mendefinisikan efisiensi merupakan sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan.

Mulyamah (1987 : 3) Efisiensi sebagai ukuran yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya sebagai sebuah masukan dengan penggunaan yang sebenarnya atau dengan kata lain penggunaan yang telah terealisasi.

Menurut peraturan anggaran dapertemen pendidikan Nomor 69 tahun 2009, anggaran operasional adalah anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan selama 1 Tahun biaya dana pendidikan. Agar satuan tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara terkendali dan berkesinambungan. sesuai dengan standart nasional pendidikan. Bantuan komersial adalah program negara yang tujuan pada hakikatnya adalah untuk membiayai biaya operasional eksternal tenaga pendidikan satuan sekolah sebagai pengembang program wajib belajar.

Menurut peraturan pemerintah pembiayaan pendidikan Nomor 48 tahun 2008, tentang penggunaan dana pendidikan oleh pemerintahan yang di

laksanakan melalui sistem anggaran pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperjelas pengelolaan Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) di perlukan pembukuan atau pelaporan transparansi dan akuntabel secara berkesambungan transparan artinya dana yang dihimpun dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk kebutuhan sekolah yang di ketahui secara terbuka oleh komite pemerintah yang bertanggung jawab. selain meningkatkan kinerja penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan pemerintah yang fleksibel, efisien dan efektif. dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah baik penerimaan maupun pengeluaran, akuntabilitas terlihat pada proses pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh sekolah dengan pembayaran yang dilakukan oleh BPD (Bank pembangunan daerah) dalam pendapatan sekolah. pada saat dana BOS digunakan untuk kegiatan operasional dan non operasional sekolah yang rentan dimanipulasi dan diukur dengan perolehan lingkungan belajar serta pemeliharaan fasilitas sekolah di kombinasikan dengan *stewardship theory* (pandangan baru tentang enggunaan dana bantuan operasional sekolah dan personel-personel yang terkait di dalamnya).

Dalam teori ini pengelolaan dana bantua operasional sekolah (BOS) di pandang sebagai sesuatu yang dapat dipercaya sesuai dengan kepentingan publik dan pemangku kepentingan terbaik masalah umum dalam program Dana BOS adalah masi kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan dana bantuan sekolah.

Sampai saat ini pengelolaan keuangan tingkat sekolah dapat dikatakan mudah karena bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan belum didukung dengan standar yang belum memadai untuk menjelaskan pengelolaan dana BOS diperlukan pembukuan dan pelaporan yang transparan dan akuntabel secara berkesimbangan. Prinsip tata kelola yang baik adalah prinsip ketaatan pada aturan hukum yang dihasilkan dari peraturan tentang pengelolaan dana BOS reguler sebagai mana tercantum dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis dari lapangan administrasi dana bantuan operasional sekolah reguler terutama digunakan untuk pembiayaan pegawai satuan sekolah dasar dan sekolah menengah yang melaksanakan program wajib belajar dan beberapa kegiatan lain dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan undang-undang dana BOS dalam permendikbud Nomor 6 tahun 2021 terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler yang tampak dimuktahirkan setiap tahunnya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan. Perlu di kembangkan petunjuk teknis untuk pengelolaan sumber daya sekolah.

Pada tahun 2001 Undang - undang otonomi daerah (OTDA) sebagai bentuk desentralisasi untuk urusan pendidikan yang dialihkan pemerintah/pemerintah kota. Dalam hal ini peran pemerintahan pusat hanya mengurus standar, norma, prosedur, dan pedoman. pemerintah menganggarkan bahwa dana bantuan operasional sekolah tetap melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) tanpa membebani masyarakat. Beberapa daerah terpelajar mengikuti program penghargaan BOSDA mulai meningkatkan kualitas

layanan pendidikan. pada tahun 2011 mekanisme penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau pernyataan dana BOS dalam menyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memerhatikan anggaran berimbang sesuai asas desentralisasi pengendalian keuangan.

### **2.1.8 kriteria efisiensi**

Ihyaul (2009:52) sebuah proses dapat di katakan efisien bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak ada yang bisa di buat tanpa adanya pengerbonan
2. Tidak ada pengeluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan
3. Tidak ada produksi Tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit

Efisiensi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi terutama yang bertujuan menghasilkan laba. Penggunaan sumber daya perusahaan secara berlebihan akan berpengaruh signifikan terhadap proses pencapaian tujuan sehingga perlu dilakukan pengukuran tingkat efisiensi untuk menilai manfaat atas penggunaan sumber daya yang di korbakan.

### **2.1.9 Pengukuran Tingkat Efisiensi, Penerimaan Dana dan Pengeluaran Dana**

- A. Pengukuran tingkat efisiensi adalah untuk membandingkan penggunaan input yang di rencanakan dengan penggunaan aktual, atau dapat di katakan sebagai perbandingan terbaik antara input dan output dengan hasil yang di capai dari aset yang di miliki. Sedangkan program hibah BOS memiliki beberapa tujuan atau agenda dalam program yang terealisasi dengan cepat

dan mudah. Artinya semua program penggunaan dana BOS dengan dana Negara melalui dinas pendidikan pengukuran dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pengeluaran dan masukan atau jumlah pengeluaran yang dihasilkan dari suatu masukan yang di gunakan dalam sekolah.

- B. penerimaan dana adalah total pendapatan yang diterima oleh produsen berupa uang yang diperoleh dari hasil yang diproduksi. Penerimaan merupakan kenaikan dari aktifitas - aktifitas yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu.
- C. Pengeluaran dana merupakan pembayaran yang dikeluarkan saat ini untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang dmi memperoleh beberapa keuntungan pengeluaran terdiri dalam tiga kategori yaitu pengeluaran tetap, pengeluaran berkala, dan pengeluaran tidak tetap. Konsep efisiensi dapat dipandang dari dua aspek yaitu aspek teknis dan aspek ekonomis. Konsep efisiensi dari sisi teknis dinamakan konsep efisiensi teknis sedangkan konsep efisiensi dari aspek ekonomis disebut dengan konsep efisien ekonomis atau harga. Dalam teori ekonomi pada umumnya menggunakan konsep efisien ekonomis. Konsep efisien ekonomis lebih menekan pada pengurangan penggunaan biaya yang tidak perlu untuk menghindari pemborosan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Penerimaan Dana Bos}}{\text{Pengeluaran Dana Bos}} \times 100\%$$

*Sumber* : APBD Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Kriteria Efisiensi adalah :

**Tabel I**  
**kriteria efisien**

<b>Nilai Efektifitas</b>	<b>Efektifitas</b>
> 100%	Tidak Efisien
> 90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Lebih kecil dari 60 %	Sangat Efisien

*Sumber* : Dana Alokasi Bos Reguler Kabupaten Deli Serdang

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka dikatakan tidak efisien
- b. Jika hasil lebih dari 90% - 100% maka dikatakan kurang efisien
- c. Jika hasil perbandingan 80% - 90% maka dikatakan cukup efisien
- d. Jika hasil perbandingan antara 60% - 80% maka dikatakan efisien
- e. Jika hasil perbandingan dibawah dari 60% maka dikatakan sangat efisien

#### **2.1.10 Efektifitas**

Efektifitas menurut bastian adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output* kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* efektifitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektifitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikansi terhadap bentuk manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektifitas merupakan pencapaian sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya yang memiliki secara efisien ditinjau dari sisi masukan (*input*) proses, maupun pengeluaran (*output*). Hal ini yang dimaksud

sumber daya meliputi ketersediaan personil sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan yang dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur dan memberikan hasil yang bermanfaat dan juga dikatakan efektif apabila suatu kegiatan mempunyai pertimbangan yang baik terhadap sasaran yang ingin dicapai.

Menurut Sukano (1983:96) efektifitas disajikan dalam sebagai pencapaian tujuan, Dengan adanya Dana Bantuan Operasional sekolah juga dapat mengambil keputusan dimana anak sekolah terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Untuk meningkatnya rasa tanggung jawab, komitmen yang tinggi dari anak sekolah terhadap sekolahnya. Kualitas dana bantuan operasional sekolah (BOS) dapat ditingkatkan melalui keterlibatan orang tua di sekolah, fleksibilitas dalam pengelolaan sekolah dan kelas, serta profesionalisme guru dan kepala sekolah. dan mempermudah pekerjaan siswa lain agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas hingga tamat. Dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BOS juga untuk meningkatkan pemerataan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan guna meningkatkan mutu, kepentingan dan daya saing pendidikan dan jenjang pendidikan sekolah, sekaligus membangun akuntabilitas dan citra publik. Efektifitas didasarkan pada suatu organisasi yang memperoleh, memanfaatkan dan memaksimalkan usaha dan mengejar suatu tujuan operasionalnya. efektifitas menggambarkan suatu pengertian terhadap keadaan dari metode - metode yang ditemukan atau kesempurnaan hasil yang diinginkan seperti halnya dalam penggunaan dana BOS disekolah termasuk

kategori efektif apabila dana tersebut tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

#### **2.1.11 kriteria efektifitas**

Ihyaul (2009:26) menyebutkan efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

1. Efektifitas individu

Efektifitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekan pada hasil karya karyawan atau anggota organisasi

2. Efektifitas kelompok

Efektifitas kelompok didasarkan pada pandangan bahwa kenyataannya individu saling bekerja sama dengan kelompok sehingga efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok

3. Efektivitas organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada hasil karya dari tiap-tiap bagiannya

#### **2.1.12 Pengukuran Tingkat Efektifitas, RABL, dan Realisasi anggaran Belanja**

A. Pengukuran Tingkat efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas *sector public*. Di katakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan

penyediaan layanan public. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Efektivitas berpengaruh dengan pengeluaran. Menurut Mardiasmo (2016) efektivitas merupakan ukuran dimana berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Suatu kerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan menghasilkan suatu unit pengeluaran (output) dan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- B. Pengelolaan Dana BOS tidak lepas dari peranan kepala sekolah mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah. Mulyasa (2006:194) menyatakan bahwa kepala sekolah profesional dituntut memiliki kemampuan manajemen keuangan sekolah baik melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pertanggung jawaban.
- C. Target Dana BOS dapat disalurkan dalam tiga tahap yaitu sebesar 30% pada tahap I paling cepat bulan januari, sebesar 40% pada tahap ke II paling cepat bulan april sebesar 30% pada tahap III paling cepat bulan september sedangkan Dana BOS Afirmasi dan kinerja disalurkan dalam tahap paling cepat bulan april. Adapun diantaranya terkait alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah selain itu perusahaan juga menyusun laporan dengan tujuan kurang lebih sama. Laporan ini dapat menunjukkan apakah laporan keuangan yang disajikan valid atau sesuai dengan kenyataan dilapangan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Pengelolaan Dana BOS}}{\text{Target Anggaran Dana BOS}} \times 100 \%$$

*Sumber* : APBD Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Kriteria efektifitas adalah :

**Tabel II kriteria Efektifitas**

<b>Nilai Efektifitas</b>	<b>Efektifitas</b>
> 100%	Sangat Efektif
> 90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Lebih kecil dari 60 %	Tidak efektif

*Sumber* : APBD Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Keputusan Menteri dalam negeri kriteria tingkat efektifitas sebagai berikut :

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka dikatakan sangat Efektif
- b. Jika hasil lebih dari 90% - 100% maka dikatakan Efektif
- c. Jika hasil perbandingan 80% - 90% maka dikatakan cukup Efektif
- d. Jika hasil perbandingan antara 60% - 80% maka dikatakan kurang Efektif
- e. Jika hasil perbandingan dibawah dari 60% maka dikatakan tidak Efektif

### **2.1.13 Manajemen Anggaran Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai tindakan pengurusan/

ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan disegala bidang baik segi sarana dan prasarana Pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga Pendidik. Untuk memenuhi sasaran tersebut sangat diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Salah satu pendanaan yang diberikan pihak pemerintah kepada sekolah yaitu dengan adanya dana Bantuan Operasioanl Sekolah atau lebih kita kenal dengan dana BOS. Perencanaan program BOS meliputi dua kegiatan utama yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yaitu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan menyusun Rencana Anggaran Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah perlu menentukan kondisi sekolah saat ini. Salah satunya dengan melakukan evaluasi diri. Dengan melakukan evaluasi diri akan menunjukkan kinerja sekolah misalnya, bagian yang mengalami perbaikan atau peningkatan, bagian yang tetap, dan bagian yang mengalami penurunan. Hal ini penting dilakukan karena dana BOS merupakan sumber utama bagi sekolah untuk memenuhi biaya penyelenggaraan sekolah, dan kebijakan pemerintah mengharuskan BOS menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar yang bermutu. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil

evaluasi diri sekolah. Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Misalnya untuk pembangunan ruang komputer, laboratorium baru, gedung perpustakaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berupa program rehab besar dana lebih diprioritaskan dari provinsi. Untuk program yang lebih operasional bisa dari dana blockgrant atau lainnya yang bersifat lebih luwes. Mengingat begitu pentingnya dalam melakukan manajemen keuangan sekolah terutama dana BOS dari pemerintah, maka diperlukan suatu sistem yang mampu melakukan pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, Sistem tersebut adalah RKAS. Aplikasi RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk menangani masalah manajemen keuangan sekolah mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Dengan sistem yang terdistribusi diharapkan berbagai pihak yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Capaian output terakhir yang diberikan sistem informasi ini adalah pelaporan, dimana setiap report yang dihasilkan sudah disesuaikan dengan format yang dikeluarkan pemerintah.

### **2.1.14 Tujuan, dan Manfaat Anggaran**

#### **a. Tujuan Anggaran**

Pada dasarnya tujuan pokok anggaran adalah untuk memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta nonfinansial dimasa yang akan datang dan mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk dapat menyatakan harapan sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk dapat mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan suatu rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidak pastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk dapat mengkoordinasi cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber.
5. Untuk dapat menyediakan sebuah alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi.

Secara umum BOS bertujuan untuk memperluas akses dan mengurangi beban masyarakat atas biaya pendidikan dalam rangka menyukseskan wajar 9 tahun yang berkualitas. Sedangkan tujuan BOS secara khusus adalah untuk

membebaskan seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dari segala pungutan terhadap biaya operasi sekolah, dan untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

## **B. Manfaat Anggaran**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya ditingkat SMP

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelolah pembagian BOS lebih adil dan bijaksana, karena hal demikian dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan prestasi belajar siswa.

#### **b. Bagi Sekolah**

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan pentingnya pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disekolah - sekolah lainnya.

#### **c. Bagi Siswa**

Jika pemerintah melaksanakan penggunaan BOS dengan baik, maka dengan dana BOS kepada setiap sekolah diharapkan siswa dapat memanfaatkan pelayanan pendidikan seperti sarana dan prasarana sekolah maksimal sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk mendapatkan prestasi yang tinggi.

### **2.1.15 Jenis - jenis anggaran BOS**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah pusat untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah. Dana BOS bisa digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran honor, pengembangan perpustakaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenarnya jenis-jenis anggaran Dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah adalah :

- a. BOS Reguler merupakan Dana BOS Reguler biasanya diberikan untuk tujuan konsumsi menyangkut kebutuhan operasional. Contohnya seperti pembelian alat multimedia pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.
- b. BOS Kinerja merupakan Dana BOS yang satu ini diberikan kepada sekolah yang berkinerja baik dalam meningkatkan rapor mutu pendidikan, agar mencapai standar nasional pendidikan. Dana ini sebagai apresiasi pemerintah terhadap sekolah-sekolah yang serius meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
- c. BOS Afiriasi merupakan Dana BOS Afiriasi diberikan kepada sekolah-sekolah. Dana ini diberikan untuk mendukung operasional rutin sekolah di daerah-daerah tersebut. penyaluran Dana BOS sudah tak lagi lewat Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) Provinsi, melainkan langsung ke rekening sekolah. Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di alokasikan untuk membantu

operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

#### **2.1.16 Laporan Realisasi Anggaran BOS**

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya. Kemudian membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Secara umum, laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Antara lain berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah.

#### **2.1.17 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran BOS**

Banyak hal yang tercantum pada sebuah laporan realisasi anggaran. LRA menyajikan informasi terkait pendapatan, transfer, belanja, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas. Dari hasil terkumpulnya informasi ini, instansi terkait dapat menjadikan LRA sebagai acuan untuk mengevaluasi berbagai jenis pengambilan keputusan. Keputusan yang dimaksud antara lain meliputi pengalokasian sumber daya ekonomi, ketaatan entitas pelaporan pada anggaran dan akuntabilitas. Di bawah ini adalah manfaat laporan realisasi anggaran, antara lain:

1. Menyajikan informasi mengenai alokasi, sumber, dan pemakaian sumber daya ekonomi.
2. Sebagai bahan proyeksi sumber daya ekonomi untuk pendanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode berikutnya.

3. Digunakan oleh pengguna laporan dalam melakukan evaluasi terhadap keputusan yang akan dibuat. Keputusan tersebut diambil ketika hendak menggunakan sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan dalam entitas pelaporan agar proses pengelolaan uang dapat berjalan lancar.
4. Gunanya laporan realisasi anggaran untuk melengkapi rincian terhadap catatan kondisi keuangan secara menyeluruh. Lengkapnya laporan dapat menjadi sumber informasi paling akurat untuk mengetahui efektifitas perolehan pendapatan dan realisasi dari sumber daya ekonomi.
5. LRA juga bisa dimanfaatkan untuk membandingkan pendapatan dari pemakaian anggaran dan mengeceknya kembali. Apakah sudah sesuai dengan peraturan UU atau belum? Laporan ini bermanfaat untuk mengambil keputusan soal alokasi sumber daya ekonomi lengkap dengan akuntabilitasnya pada periode mendatang.

#### **2.1.18 Kinerja Anggaran BOS**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan anggaran
2. Belanja kontraktual
3. Penyelesaian tagihan
4. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

### **2.1.19 Pengelola Keuangan Sekolah**

Keuangan sekolah perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan sekolah penting untuk dilakukan agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dalam mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan sabagai asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan. Menurut Soetjipto (1992:76) pengelolaan keuangan meliputi : kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertip adminstrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana BOS yang diberikan untuk sekolah juga perlu dikelola dengan baik. Menurut Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun 2012 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, dan dua puluh lima tahunan. Dengan adanya rencana, penggunaan dana BOS dapat dilakukan dengan baik. Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS ini tidak semua kebutuhan sekolah dapat dipenuhi. Karena dana BOS ini hanya membiayai komponen - komponen kegiatan tertentu, seperti pembelian / penggantian buku teks pelajaran, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, perawatan sekolah, pembayaran bulanan guru honorer dan lain sebagainya.

### **2.1.20 Pembiayaan pendidikan**

Menurut Bastian (2007:160) Pembiayaan pendidikan adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan biaya non operasional bagian satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 Tahun.

Menurut petunjuk teknis bantuan operasional sekolah (BOS) SMP tahun 2015 merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMP baik negeri maupun swasta dimana besarnya bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (*unit cost*) bantuan.

### **2.1.21 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Secara umum tujuan penggunaan dana bantuan operasional adalah untuk meringankan beban masyarakat dari pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yg berkualitas. tujuan dari penggunaan Dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah Dana bantuan operasional sekolah dalam juknis yang berdasarkan peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia

1. Membantu penyediaan pendanaan operasional sekolah dan beberapa pembiayaan personil yang dapat di alokasikan dari dana BOS.
2. Membebaskan biaya operasional sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintahan
3. Keringanan beban biaya operasional sekolah bagi siswa yang kurang mampu.
4. Mengurangi angka putus sekolah dan

5. Untuk meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran di sekolah

### **2.1.22 Besaran Penggunaan Dana Bantuan Operasioal Sekolah (BOS)**

Dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan termasuk SLB tidaklah sama tergantung banyaknya siswa yang terdaftar di NISN Dapodik pada tahun 2021 besaran BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

### **2.1.23 Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen berbasis Sekolah (MBS)**

Kementrian indonesia merancang Manajemen berbasis sekolah (MBS) sejak tahun 1999 melalui project manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) oleh karena itu MBS merupakan model otonomi pendidikan yang di laksanakan di sekolah

Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu strategi wajib yang ditetapkan indonesia sebagai standar pengembangan keunggulan manajemen sekolah tuntutan ini bertuang dalam USPN nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan sekolah menengah berdasarkan pada standar layanan minimal menurut prinsip pengelolaan khusus sekolah

Rohiat (2008:47) mendefinisikan kepemimpinan berbasis sekolah sebagai model kepemimpinan yang memberikan otonomi lebih banyak wewenang dan tanggung jawab sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku myers dan stonehil dalam umaed, hadianto dan siswantari (2009:43) berpendapat bahwa manajemen sekolah sebagai strategi dari tahun 1819 untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mentransfer kekuasaan

pengambilan keputusan dari pemerintahan pusat ke daerah dan kemasing-masing sekolah sehingga kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa memiliki kontrol yang lebih besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, proses dan tanggung jawab atas keputusan tentang pendanaan, kepegawaian dan kurikulum sekolah.

Suryosubroto (2004:196) mengartikan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah strategi manajemen penyelenggaran pendidikan di sekolah yang menekan pada mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan internal sekolah secara efisien dan efektif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten atau berkualitas pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kualifikasi lulusan yang kompeten atau berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kualifikasi kelulusan. Standar proses dikembangkan berdasarkan kualifikasi dan standar isi kelulusan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomo 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomo 19 tahun 2005 sesuai dengan peraturan pendidikan nasional

Manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan model penerapan manajemen kelembangaan yang mengintegrasikan seluruh sumber internal dan eksternal serta lebih menekan pada pentingnya kebijakan melalui perluasan otonomi sekolah. tujuannya adalah untuk mengarahkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. definisi tersebut mengacu pada visi, misi, dan tujuan yang dikemas dalam perencanaan dan pembangunan politik dari beberapa

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah merupakan strategi pemerintah dalam pelaksanaan manajemen pendidikan yang berbeda dengan gerakan pengarahannya yang terpusat. Terdesentralisasi yang mempengaruhi fleksibilitas kepala sekolah dalam hal kepemimpinan sekolah terlibat dalam pencapaian tujuan siswa sekolah undang undang saat ini meningkatkan kualitas pendidikan tergantung pada keterampilan, minat dan perkembangan fisik dan psikologis oleh karena itu setiap satuan pendidikan melaksanakan RPP, melaksanakan proses pembelajaran dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menurut Amini (2001:38) dalam pelaksanaan penggunaan dan bantuan operasional sekolah (BOS) mewajibkan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis yang ada . dalam kegiatan dana bantuan oprasional sekolah. dana BOS yang diterima setiap triwulan oleh sekolah dapat digunakan sesuai yang direncanakan.

#### **2.1.24 Mekanisme Pencairan Dana**

Pengalokasian atau pencairan dana BOS adalah sebagai berikut:

- a. Tim pengelola pusat melalui pengelolaan dana BOS mendata jumlah siswa disetiap sekolah kemudian ditentukan alokasi dana untuk setiap setiap provinsi
- b. berdasarkan jumlah siswa per sekolah tim pengelola pusat menyediakan dana untuk setiap provinsi sebagaimana ditetapkan dalam DIPA provinsi

- c. tim pengelola Dana BOS kabupaten/kota melakukan konfirmasi ulang data pendaftaran siswa setiap sekolah untuk memutuskan alokasi masing-masing disekolah
- d. pemerintah/kota menetapkan dengan surat keputusan (SK) sekolah mana yang siap menerima Dana bantuan operasional sekolah (BOS). Yang ditandatangani oleh Bupati/walikota dan dewan sekolah serta dilampirkan sk yang ditandatangani. Daftar sekolah dan jumlah dukungan yang diterima sekolah yang ingin menerima BOS harus mendatangi surat perjanjian pemberian Hibah (SPPB)
- e. otoritas Dana BOS kabupaten/kota memberikan pemberitahuan penghargaan otoritas Dana BOS provinsi ke Bank/kantor pos yang menyalurkan dana ke sekolah penerima Dana bantuan operasional sekolah (BOS).

#### **2.1.25 Perencanaan Keuangan Dana BOS**

Perencanaan keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) diawali dengan RKAS (Rencana kegiatan anggaran sekolah) sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. penyusunan RKAS dilaksanakan pada awal periode yaitu pada bulan Januari. Dalam penyusunan RKAS perlu diikuti kepala sekolah, bendahara, guru orang tua, komite sekolah, melalui forum rapat dalam perencanaan RKAS selanjutnya.

### **2.1.26 Penyusunan Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban**

Sesuai dengan standar administrasi pendidikan dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan dan tanggung jawab lembaga pengelola keuangan buku dan dokumen yang harus dikeluarkan oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RKAS
2. Buku kas umum (BKU)
3. Buku kas anak perusahaan
4. Sub buku besar bank
5. Buku panduan pajak
6. Bukti pengeluaran,kwitansi/tagihan setelah pengelolaan

Laporan lembaga sekolah diteruskan kedinas pendidikan provinsi sumatra utara melalui dinas pendidikan kabupaten deli serdang. Informasi penggunaan dana yang disajikan sebagai laporan adalah informasi yang berasal dari triwulanan laporan ini harus diunggah setiap triwulanan kesitus web pada awal triwulan berikutnya. Bukti yang harus diterbitkan oleh sekolah adalah pernyataan penggunaan dana untuk setiap sumber keuangan dan ringkasan penggunaan dana.

### **2.1.27 Pengendalian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Kegiatan pengendalian terencana adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengurangi atau mencegah permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pemborosan dana pemerintah,pungutan liar dan penyalahgunaan lainnya.

program BOS meliputi audit substantif,audit operasional dan audit komunitas.

- a. pengendalian intern adalah pengendalian yang dilakukan setiap kepala dinas terhadap bawahannya ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah
- b. pengawasan internal, inspektur jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan inspektur daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan pemeriksaan atas permintaan kebutuhan lembaga atau entitas yang dikendalikan dan menurut rencana mereka sendiri, pemeriksaan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan atas permintaan pengawas pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) swedia sesuai kewenangannya
- c. pengendalian masyarakat dalam kaitannya dengan tranparansi dana BOS disekolah kabupaten/kota, provinsi dan pusat mengacu pada prinsip keterbukaan informais publik yaitu: semua dokumen BOS tersedia untuk umum, kecuali yang bersifat rahasia. apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS hal tersebut harus segera dilaporkan kepada otoritas pengendalian operasional atau instansi yang berwenang komponen utama yang harus dipantau dalam pemantauan pengelolaan dana BOS adalah alokasi dana seperti penerimaan manfaat alokasi dan penggunaan dana penggunaan layanan dan panduan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara teknis perbedaan antara pengawasan dan pengendalian adalah fokus kontrol fokus pada individu yang mengarahkan program atau melakukan aktivitas.

### **2.1.28 Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

Menurut manullang(2008:173) Pengawasan merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaannya program yang telah direncanakan hal ini bertujuan untuk memantau perkembangan pelaksanaan Bantuan operasional sekolah (BOS).

### **2.1.29 Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan yaitu keterbukaan penyelenggaran untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan di lembaga pendidikan transparansi dalam mengelolah keuangan untuk memperjelas sumber pendapat penggunaan pertanggung jawaban (jamal asmani ma'mur 2012 sementara itu menurut mardiasmo (2002) transparansi berarti keterbukaan manajemen dalam mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi

### **2.1.30 Ciri - Ciri Transparansi**

Ciri-ciri transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah :

1. Informasi kebijak fiskal
2. Pengungkapan sumber dana dan jumlahnya
3. Transparansi penggunaan dana dan akuntabilitas

### **2.1.31 Tujuan Transparansi**

Tujuan transparansi dan instusi dalam pengelolaan keuangan :

- a. Cegah penyalahgunaan dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui pengawasan sosial
- b. menghindari kesalahan komunikasi dan kesalahpahaman

- c. mendorong masyarakat untuk untuk belajar tanggung jawab atas keputusan dan pelaksanaan tindakan
- d. bangun kepercayaan yang terlibat dengan tindakan yang diambil pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan peraturan prinsip dan nilai universal dari tujuan transparan dapat meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan dana, menghindari kecurigaan publik dan mencapai tujuan.

### **2.1.32 Manfaat Transparansi**

Manfaat transparansi dapat menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan siswa sekolah dengan memberikan informasi dan memastikan bahwa informasi yang benar dan memadai mudah diperoleh menurut andrianto manfaat ganda pentingnya transparansi anggaran adalah sebagai berikut.

- a. mencegah korupsi
  - b. lebih mudah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan politik
  - c. meningkatkan akuntabilitas agar masyarakat dapat “mengukur kinerja” lembaga dengan lebih baik
  - d. meningkatkan kepercayaan terhadap tugas lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
  - e. penguatan kohesi sosial melalui kepercayaan umum institusi
  - f. menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha
- pendapat ahli tentang manfaat transparansi menunjukkan bahwa manfaat transparansi terletak pada penerapan praktik yang dapat dipantau dan pencegahan kecurangan.

## 2.2 Penelitian Sebelumnya

Hasil dari penelitian ini merupakan hasil yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya terutama dalam hal - hal yang berkaitan dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya persamaan dan perbedaan dari penelitian yang ada serta sebagai referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

**Tabel III**  
**Penelitian Sebelumnya**

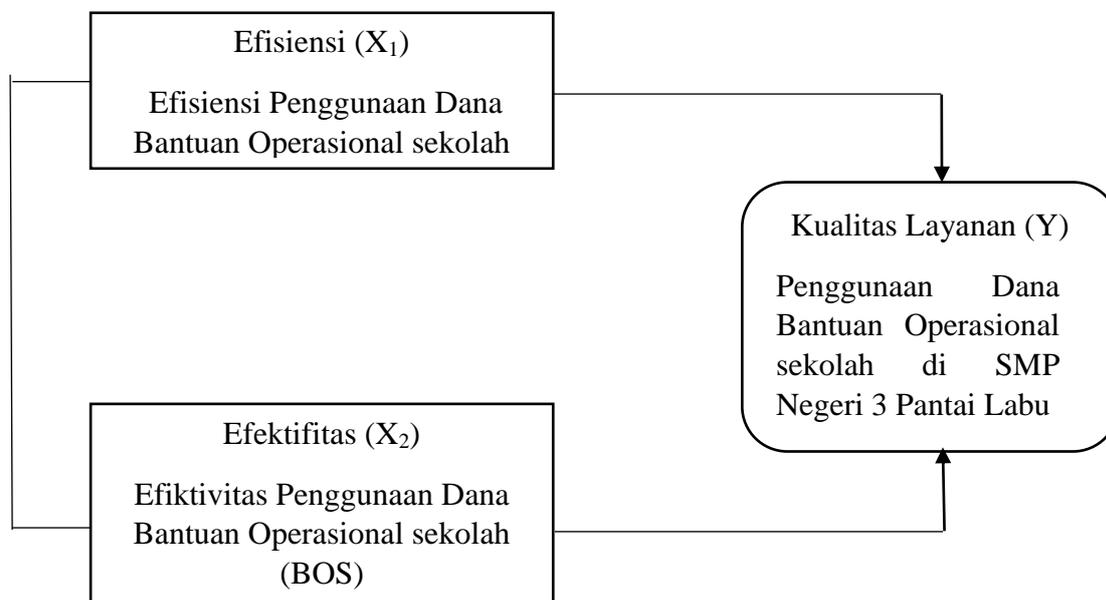
NO	Judul/Jurnal	Hasil
1.	Efisiensi penggunaan dana bantuan operasional sekolah di Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang	Penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa penggunaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.
2.	Efektifitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di MTS Lipatkain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	Secara keseluruhan penggunaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Dalam penelitian ini di lihat dari hasil akhir yang menunjukkan hasil yang signifikasi pemantauan dan pengawasan perlu melakukan monitoring yang dilakukan secara terpadu oleh tim independen
3.	Penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan sekolah gratis wilayah kecamatan Blimbing kota malang	Menunjukkan bahwa transfer pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa subsidi dana pendidikan Bos dan sekolah gratis telah dirasakan manfaatnya di wilayah kecamatan blimbing kota malang. siswa tidak lagi ditarik pungutan. Tetapi terdapat kendala yaitu jumlah dana yang diberikan belum mampu untuk menutupi seluruh biaya operasional sekolah dikarena tidak adanya pungutan yang diambil

		dari siswa. Maka dari itu diharapkan adanya peran serta masyarakat. Akan tetapi jika terjadi hal yang dilematis yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan dana BOS dan sekolah gratis tentunya juga akan berimbas terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dana operasional sekolah
--	--	--

*Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu*

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual didefinisikan oleh beberapa dimensi mulai dari lulusan unggul dan berkualitas, sarana dan prasana yang lengkap dan memadai pengajar dan tenaga pengajar yang handal serta pengelolaan keuangan yang baik. Sekolah berkualitas tinggi karena akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan dengan baik, permasalahan terkait pengelolaan dana BOS karena kurangnya akuntabilitas pengelolaan, kurangnya media sebagai alat informasi terkait keuangan dan pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara maksimal dalam pengelolaan dana BOS. Menegakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS akan meningkatkan kualitas sekolah jika dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang tepat.



GAMBAR 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, dapat dijelaskan bahwa : Efisiensi penggunaan dana BOS yang merupakan Variabel bebas ( $X_1$ ) memiliki keterkaitan terhadap variabel terikat (Y) yaitu penggunaan dana BOS. Begitu juga dengan efektifitas penggunaan dana BOS terkait terhadap penggunaan dana BOS.

#### 2.4 Hipotesis

Berdasarkan Landasan teori dan kerangka koseptual di atas maka peneliti dapat mengajukan Hipotesis Efesiensi dan efektifitas penggunaan dana bantuan operasional sekolah secara persial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan belajar mengajar.